

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas infrastruktur jalan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan perubahan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yaitu pungutan PBB dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah sejak 2009. Studi ini mengukur desentralisasi fiskal dengan durasi suatu kabupaten/kota mengumpulkan pajaknya sendiri. Studi ini mengukur infrastruktur jalan dengan menggunakan persentase desa di kabupaten/kota yang memiliki jalan beraspal. Dengan menggunakan data *cross-section* yang mencakup 505 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dan metode OLS, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur jalan (jalan aspal). Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan korupsi mungkin dapat menjelaskan bagaimana desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Infrastruktur Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

JEL: H41, H54, H71

